

IMPLEMENTASI PROGRAM *ECOMOBILE* PT.PEMBANGKITAN JAWA-BALI DI JALAN RAYA DARMO SURABAYA

Andy Ramadhan Kurnia
S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA (andyramadhankurnia25@gmail.com)

Tjitjik Rahaju, S.Sos, M.Si

Abstrak

Program Ecomobile PJB merupakan program edukasi lingkungan hidup keliling yang diusung oleh PT.PJB untuk menunjukkan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) terhadap lingkungan sekitar . PT.PJB dibantu Tunas Hijau Club dalam pelaksanaan kegiatan Ecomobile. Alasan utama PT.PJB dan Tunas Hijau melaksanakan program ecomobile karena melihat masyarakat dunia saat ini menghadapi persoalan serius terkait dengandegradasi sumber daya alam, energi, serta lingkungan hidup. Pemanfaatan daneksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan upaya konservasimulai menampilkan dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkunganhidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam,tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri.Pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang memadukanantara praktek dan teori menjadi diantara solusi jitu dalam mengatasipermasalahan lingkungan hidup yang terjadi itu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari staff CSR, Tunas Hijau Club, Aktivist serta masyarakat sekitar yang ikut serta dalam program Ecomobile PJB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan empat macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur, obserbasi langsung, dokumentasi, dan triangulasi teknik. Analisis data dilakuka dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya jika dilihat dari variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. (dalam Leo Agustino, 2008 : 149-154) yaitu: 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur birokrasi.. Bahwasanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai PT.PJB dalam pelaksanaan program Ecomobile. Akan tetapi ada beberapa kekuarangan terhadap pelaksanaan program ini yaitu;komunikasi yang belum maksimal antara PT.PJB dan Tunas Hijau Club yang menyebabkan proses evaluasi program tidak maksimal dilaksanakan oleh PT.PJB, dan kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan Ecomobile.

Kata Kunci: Implementasi Program, CSR, Program *Ecomobile*

Abstract

PJB ecomobile program is a program of environmental education around that published by PT.PJB to demonstrate corporate social responsibility (CSR) to the surrounding environment, PT.PJB is supported by Tunas Hijau Club in the implementation of ecomobile. The main reason PT.PJB and Tunas Hijau in the implementation of ecomobile for public viewing the world is currently facing serious problems related to the degradation of natural resources of energy and the environment. Utilization and exploitation of natural resources which are not off set by the conversion starts displaying negative impact on continuance of environment, this not only threatens continuance of natural environment but also endagers human life. Sustainable environmental education that combine practice and theory be a perfect solution and overcome environmental issues that occur.

This type of research is descriptive by qualitative approach. Subyek of this study consisted of CSR staff, community activists about participating in the PJB ecomobile program. Data is collected by qualitative research method that uses four kinds of data collection they are semi structured interviews, Direct observation, documentation, triangulation techniques. Data analysis performed with data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

The results showed that the implementation of corporate social responsibility in the environmental field PT.PJB ecomobile highway program darmo Surabaya. If the views of the variables that affect the implementation of policies by George C. III. (dalam Leo Agustino 2008: 149-154) they are: 1. Communication 2. Resource 3. Disposition 4. Bureaucracy structure. That has been running well in accordance goals to be achieved by PT.PJB in the implementation of ecomobile program. But there are some drawbacks to this program is not maximum communication between PT.PJB and Tunas Hijau Club which causes the evaluation process is not maximum that implemented by PT.PJB and Reduction SDM in the implementation of ecomobile.

Keyword : Implementation Program, Corporate Social Responsibility, Ecomobile Program.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh sektor industri, jadi seharusnya semakin pesatnya dunia usaha yang ada di Indonesia, perusahaan juga harus berlomba-lomba untuk lebih meningkatkan kualitasnya, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas yang ada untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang semakin modern dan persaingan yang ketat antar perusahaan yang terjadi di Indonesia maupun seluruh dunia. Beberapa indikator keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan di dalam dunia usaha adalah profit dan pertumbuhan. Setiap perusahaan pasti memiliki orientasi dalam memajukan perusahaannya, untuk itu perusahaan berusaha untuk membangun citra yang baik di masyarakat dengan memberikan perhatiannya kepada lingkungan atau tanggung jawab sosial, yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Program CSR adalah salah satu aturan dasar pemerintah Indonesia yang harus direalisasikan oleh setiap perusahaan di Indonesia adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU-PT) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 2 Juli 2007. UU tersebut disahkan sebagai perubahan atas UU tentang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995. Salah satu pasal dalam UU-PT 2007 tersebut, yakni dalam pasal 74 ayat 1, disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan aturan yang disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan kini wajib mengeluarkan dana perusahaannya untuk mendanai kegiatan-kegiatan masyarakat. Beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam telah mampu mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan CSR-nya dengan baik. Setelah lima tahun sejak Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 disahkan, kemudian dikeluarkan

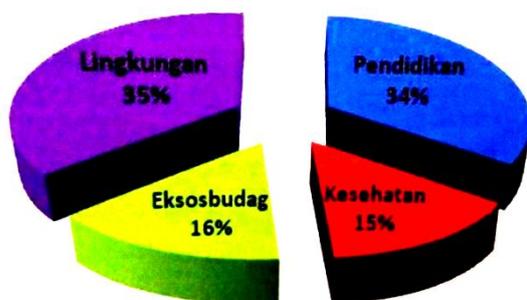
peraturan teknis CSR dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 01 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang lebih detail dalam mengatur CSR pada Perseroan Terbatas.

Berbeda dengan PT.Pembangkitan Jawa-Bali, pelaksanaan CSR sudah dilakukan PT.Pembangkitan Jawa-Bali jauh sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diterbitkan. Sejak berdiri tahun 1995 PT.Pembangkitan Jawa-Bali telah melaksanakan program CSR, yang semula dikenal dengan nama *Community Development* (Comdev). Ini dilakukan PT.Pembangkitan Jawa-Bali menyadari bahwa dalam mewujudkan tekad menjadi perusahaan pembangkit yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PT.Pembangkitan Jawa-Bali berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kinerja prima tidak hanya secara keuangan dan oprasional, tetapi mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program CSR, PT.Pembangkitan Jawa-Bali menetapkan pedoman pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui surat keputusan direksi PT.Pembangkitan Jawa-Bali Nomer: 073.K/010/DIR/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pedoman pelaksanaan *Corporate Social responsibility*.

PT.Pembangkitan Jawa-Bali merupakan perusahaan BUMN yang mampu mengawali program CSR di banding perusahaan-perusahaan lain khususnya BUMN. Banyak diantara 4 (empat) bidang CSR PT.Pembangkitan Jawa-Bali yang memperoleh CSR Award. Khususnya bidang Kamtibmas dan Lingkungan hidup yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. <http://eco-mobile.tunashijau.org/> Berikut adalah presentase anggaran CSR 2014 dalam tiap bidang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Grafik Anggaran CSR Tahun 2014



Sumber: Buku Annual Riport PT.PJB Tahun 2014

Tahun 2014 PT.PJB bersama Tunas Hijau Club berkerjasama untuk melaksanakan program Ecomobile PJB. *Ecomobile* PJB merupakan mobil edukasi lingkungan hidup keliling bantuan PT.Pembangkitan Jawa-Bali. Eco Mobile PJB merupakan mobil van yang dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), perpustakaan lingkungan hidup, *mini theatre* (TV LED 39 inch dan *sound system*) dan perangkat teknologi informasi. Eco Mobile PJB adalah mobil edukasi lingkungan hidup keliling yang berkerjasama dengan lembaga lingkungan hidup Tunas Hijau. (www.ptpjb.com).

Alasan utama PT.PJB dan Tunas Hijau Club melaksanakan program ecomobile PJB ini karena melihat masyarakat dunia saat ini menghadapi persoalan serius terkait dengan degradasi sumber daya alam, energi, serta lingkungan hidup. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan upaya konservasi mulai menampilkan dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Diantaranya, kenaikan suhu permukaan bumi, hujan yang turun dengan sporadis, musim hujan yang bergeser dan banjir ketika hujan turun. Ada juga dampak hujan yang turun sepanjang tahun, yang kemudian dibarengi dengan kemarau panjang yang melanda. Pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang memadukan antara praktek dan teori menjadi diantara solusi jitu dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi itu. Tentunya pendidikan lingkungan hidup itu bisa diarahkan pada pembentukan individu-individu yang memiliki attitudes atau kebiasaan ramah lingkungan hidup. Sehingga semakin banyak individu, masyarakat dan sekolah yang merasa memiliki kepedulian tinggi untuk berperan serta aktif pada upaya mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu lingkungan hidup yang berkualitas, yang membuat nyaman bagi setiap individu. <http://eco-mobile.tunashijau.org/>

Target grup pelaksanaan program *Ecomobile* ini adalah anak pra sekolah, dan usia sekolah, yaitu: SD,SMP, SMA maupun mahasiswa atau mahasiswi, komunitas anak muda usia 8 sampai 22 tahun dan masyarakat luas. Pada hari Minggu *Ecomobile* PJB beroperasi di Jalan Raya Darmo Surabaya karena biasanya pada hari itu di daerah tersebut digunakan sebagai lokasi *Car Free Day*. PT.PJB dan Tunas Hijau Club menjadikan Jalan Raya Darmo Surabaya sebagai lokasi pelaksanaan program Ecomobile karena letak

Jalan Raya Darmo sendiri berdekatan dengan Taman Bungkul Surabaya dan pada hari Minggu di daerah tersebut ramai didatangi pengunjung dari berbagai usia, sesuai dengan target grup pelaksanaan Ecomobile yaitu memberikan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat luas. Untuk itu peneliti mengambil lokasi penelitian di Jalan Raya Darmo Surabaya (<http://eco-mobile.tunashijau.org/>)

Selain beberapa keunikan program Ecomobile PJB terdapat juga masalah yang terjadi terhadap pelaksanaan program *Ecomobile PJB* yaitu kurangnya komunikasi antara PT.PJB dan Tunas Hijau Club seperti yang di ungkapkan oleh Staff CSR PT.PJB Bapak Puri Handoko yaitu sebenarnya pelaksanaan program Ecomobile sudah berjalan sesuai dengan perjanjian kerjasama program Ecomobile PJB ini tetapi terkadang Tunas Hijau tidak berkoordinasi jika ada event-event besar. Maka terlihatnya kami hanya mendanai tetapi tidak ikut serta dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB, walaupun kami pihak PJB memang tidak bisa ikut serta setiap hari tetapi setidaknya ada informasi ke kami jika ada event besar yang berkaitan dengan program Ecomobile PJB. (15 Juni 2015)

Dari beberapa masalah yang terjadi pada pelaksanaan program ecomobile PJB serta melihat bahwa PT.PJB merupakan perusahaan yang pertamakali mengeluarkan program *Ecomobile*. Untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti **Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya.**

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2008 : 149-154) yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur birokrasi. Teori model implementasi menurut George C. Edward III digunakan karena dianggap sebagai model implementasi yang paling tepat dalam menganalisis Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. yang sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya baik sumber daya material maupun sumber daya manusia, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sebagai pihak-pihak pelaksana program, apabila tidak ada hal tersebut maka program Ecomobile PJB tersebut tidak

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jalan Raya Darmo Surabaya dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena target grup PT.PJB dan Tunas Hijau Club bukan hanya anak sekolah melainkan seluruh masyarakat yang berada di kota Surabaya dan pada hari minggu lokasi tersebut digunakan sebagai lokasi Car Free Day oleh Pemerintah Kota Surabaya maka ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai usia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendiskripsikan Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Lesthia Chrysantin, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya (2011) dengan judul “Strategi *Public Relations* PT.PJB (Pembangkitan Jawa-Bali) Dalam Program CSR Bank Sampah” Penelitian ini memberikan deskripsi mengenai strategi *public relations* PT PJB dalam program CSR Bank Sampah. Menggunakan konsep *grand strategy*, *strategy* dan *tactis*, peneliti mengamati proses *scanning* lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi & *control* dalam pelaksanaan CSR untuk menganalisis strategi *public relations*. Hasil penelitian menunjukkan *public relations* PT PJB memiliki model *cooperative grand strategy* dalam perumusan strategi kegiatan CSR Bank Sampah, dimana bersikap *share* (interdependen) *terhadap goal* organisasi, bersikap negatif pada perubahan (*change*), menganggap publik sebagai bagian konstruktif untuk perusahaan, menganggap isu sebagai bagian yang harus dipecahkan (*solve*), mengacu pada komunikasi dua arah (*two-ways*), serta menganggap peranan praktisi

public relations sebagai manajer komunikasi perusahaan. Kesemuanya itu mempengaruhi dan diturunkan dalam strategi *public relations*, khususnya dalam tahapan *scanning* lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi & *control* dari program CSR Bank Sampah. Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi *public relations* PT PJB ini dimulai dengan adanya pengkondisian kerjasama dengan mitra kerja, dan adanya tujuan lain yang melatarbelakangi kegiatan CSR. Sehingga penetapan isu, sasaran hingga tim pelaksana di lapangan memiliki kedekatan dengan mitra kerja yang bersangkutan, dan membuat proses setiap tahapan berjalan dengan baik hingga mampu merubah perilaku masyarakat.

2. Edi Syahputra (2008), dengan judul Tesis "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun) permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah tentang, pengaturan Corporate Social Responsibility di lingkungan BUMN, Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat lingkungan PTPN *IV Unit Kebun Dolok Ilir di Kabupaten Simalungun dan dampak Implementasi Corporate Social Responsibility. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai Implementasi CSR terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. Dengan melakukan studi dokumen, wawancara dengan informan untuk mengetahui lebih mendalam dan rinci tentang hal-hal yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan Tentang CSR di lingkungan BUMN, secara rinci masih dalam bentuk Keputusan Menteri, dengan demikian kekuatan memaksa ada namun belum terdapatnya sanksinya, Implementasi CSR oleh PTPN IV masih bersifat karitas ketimbang filantropis, dampak implementasi CSR belum memberikan dampak yang baik. Maka disarankan hendaklah PP yang merupakan manifestasi dari UU Nomor 40 Tahun 2007 dapat segera diberlakukan, implementasi CSR hendaknya berdasarkan kesinambungan bagi masyarakat, selanjutnya dampak implementasi hendaknya benar-benar terwujud dalam kerangka

pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan kemanfaatan dan keadilan.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2006:23) adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan ada yang mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bukan orang-orang atau golongan.

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (Soebarsono, 2008:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Pengertian dari konsep tersebut sangat luas, karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Menurut Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan yaitu sebagai berikut:

"Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu."

C. Implementasi Kebijakan

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005:102):

"implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.”

2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada. Unsur-unsur tersebut adalah :

a. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut : Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

b. Adanya program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa *Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect*. Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan *budget*.

c. Target group atau kelompok sasaran

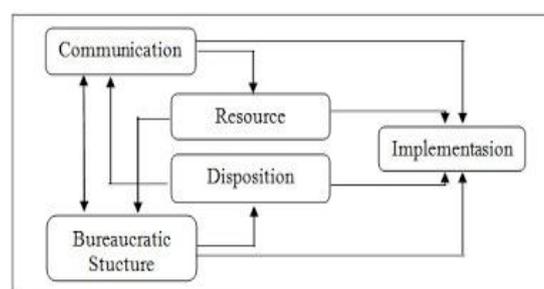
Unsur implementasi kebijakan publik yang terakhir adalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa : *target group* atau kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

D. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. (dalam Leo Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur birokrasi.

Gambar 2.1

Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2008 : 150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan,

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C.Edward III (dalam Leo Agustino, 2008 :151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak ompoten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C.Edward III (dalam Leo Agustino, 2008:152-154), adalah :

- a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang

diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

- b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Menurut Edward III (dalam Leo Agustino, 2008 : 153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

- a) *Standar Operating Procedures* (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya

setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

- b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Definisi dari pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2008:06) sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan keadaan subyek atau obyek secara kongkrit berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tentang Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. Deskripsi dari data-data yang diperoleh tersebut sebagai hasil dari penelitian yang diperoleh dari data-data tertulis maupun lisan yang bersumber dari orang-orang yang telah diwawancarai. Penelitian ini membutuhkan data yang bersifat proses serta deskripsi yang mendalam, dan penelitian kuantitatif dirasa kurang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jalan Raya Darmo Surabaya, Pemilihan lokasi ini di dasari oleh karena lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang rutin setiap hari minggu didatangi *Ecomobile* karena target group *Ecomobil* di Jalan Raya Darmo tersebut adalah masyarakat yang sedang melaksanakan *Car Free Day*. Selain itu juga Daerah Darmo termasuk lokasi yang menjadi prioritas pelaksanaan CSR PT.PJB yang berada di wilayah sekitar perusahaan dan Jalan Raya Darmo termasuk ke criteria wilayah pelaksanaan CSR PT.PJB Ring III yaitu wilayah kabupaten atau kota dimana asset PT.PJB berlokasi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Adapun yang menjadi focus penelitian adalah Bagaimana Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. yang di analisis dengan teori model implementasi menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2008 : 149-154) yaitu: 1.Komunikasi, 2.Sumberdaya, 3.Disposisi, dan 4.Struktur birokrasi.

D. Sumber Data

Sumber data menurut Sugiyono (2010:156) yaitu melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak pelaksana program Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. yaitu Devisi CSR PT.Pembangkitan Jawa Bali, Tunas Hijau Indonesia yang terletak di Semolowaru Surabaya, Pelaksana Program *Ecomobile* yang secara langsung melaksanakan program *Ecomobile*, dan masyarakat yang menjadi target grup program tersebut, penggalan data primer diperkuat dengan kegiatan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. , langkah tersebut dilakukan agar dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang akan digali pada penelitian ini adalah hasil studi pustaka dari referensi-referensi terkait kajian penelitian serta dokumen dan arsip milik pihak pelaksana Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. , yakni PT.Pembangkitan Jawa-Bali dan Tunas Hijau Club yang sangat berguna untuk mendukung sumber data primer.

E. Subjek Penelitian

Pengumpulan data sebagai pendukung untuk memperoleh informasi tentang implementasi program CSR Bidang Lingkungan (*Ecomobile* PJB)

Di Jalan Raya Darmo Surabaya yang nantinya dapat diidentifikasi factor factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. dilakukan dengan menggunakan subyek penelitian yang ditemukan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Devisi *Corporate Social Responsibility* PT.PJB
- b. Tim Pengelola Program *Ecomobile* di Jalan Raya Darmo Surabaya
- c. Tunas Hijau Club
- d. Masyarakat yang menjadi sasaran program *Ecomobile* PJB.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengambilan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe observasi observasi terus terang atau tersamar. Menurut Sugiyono (2013:66) menyatakan bahwa observasi terus terang adalah teknik pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian sehingga sumber-sumber yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti melihat secara langsung di lapangan apa saja factor yang mempengaruhi Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. Kegiatan ini dikenal dengan observasi partisipasi pasif (Sugiyono,2009:227). Pelaksanaan observasi ini dilakukan dalam rangka mencari data realistik di lapangan Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi juga merupakan teknik yang sangat penting dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013:82) dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, dimana merupakan pelengkap dari dua teknik yang telah disebutkan di atas agar data yang diperoleh lebih *valid, reliable, dan akuntable* tentang Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya.

3. Wawancara

Selain menggunakan observasi, peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi juga menggunakan teknik wawancara. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2013:72), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam secara tak berstruktur, yang artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan teknik ini peneliti berharap wawancara berlangsung secara fleksibel, lebih terbuka, percakapan tidak membuat jenuh sehingga informasi yang diperoleh lebih banyak.

Proses wawancara dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya.

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2013:83) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observatif partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Program Ecomobile

PT.Pembangkitan Jawa-Bali merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga listrik melalui kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan handal. Hingga saat ini PT.Pembangkitan Jawa-Bali telah memiliki dan mengelola 6 (enam) unit pembangkit dengan kapasitas terpasang 6.157 MW, yang tersebar di Pulau Jawa. PT.Pembangkitan Jawa-Bali berdiri pada tahun 1995, sejalan dengan semangat bisnis untuk menciptakan keuntungan, PT.PJB juga bertekad mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energy listrik yang bermutu tinggi, handal dan ramah lingkungan. (Annual Riport PT.PJB tahun 2012.

Unit bisnis PJB terdiri dari 6 Unit pembangkit, 2 unit pelayanan pemeliharaan 4 unit bisnis jasa dan pemeliharaan (UBJOM) yaitu:

- 1) Unit Pembangkit (UP)
 - a) UP Muarah Karang
 - b) UP Muarah Tawar
 - c) UP Gresik
 - d) UP Paiton
 - e) UP Brantas
 - f) UP Cirata
- 2) Unit Pelayanan Pemeliharaan (UPH)

- a) Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayahatimur (UPHT)
 - b) Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB)
- 3) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (UBJOM)
- a) UBJOM Rembang
 - b) UBJOM Indramayu
 - c) UBJOM Pacitan
 - d) UBJOM Paiton

Dari 6 unit pembangkit tersebut menghasilkan energy yang akan dijual atau disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) system jawa-bali yang dikelola oleh PT. PLN (persero) dan kemudian di distribusikan kepada para pelanggan. Disamping usaha utamanya, PJB juga memiliki bidang usaha Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan (UBJOM) dan *Engineering Procurement and Construction* (EPC) yang merupakan unit pengembangan usaha penunjang tenaga listrik dengan koordinasi di bawah anak perusahaan PJB yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali Services (PJBS) dan PT Rekadaya ElektriKA.

a. Visi, Misi, dan Tujuan PT. Pembangkitan Jawa-Bali

1) Visi Perusahaan

“Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang termuka dengan standar kelas dunia”

2) Misi Perusahaan

- a) Memproduksi tenaga listrik yang andal dan berdaya saing
PJB akan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan berupa kualitas pembangkit dengan EAF yang tinggi, EFOR yang rendah, serta harga kompetitif.
- b) Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tatakelola pembangkit andansinergi business partner dengan metode best practice dan ramah lingkungan
PJB akan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi praktek-praktek terbaik dan ramah lingkungan dalam pengelolaan pembangkit andanbersinergi dengan para *partner* bisnis dalam portofolio bisnis PJB untuk membangun kemitraan yang menguntungkan secara timbale balik.
- c) Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik

dan manajerial yang unggul, serta berwawasan bisnis PJB akan mengelola pembangkit dengan standar kelas dunia melalui keunggulan SDM yang memiliki kompetensi teknik keilmuan sesuai dengan bidang tugasnya, kompetensi mengelola pekerjaan, dan berwawasan bisnis (technically competence, managerial skillfull, commercially soundmind).

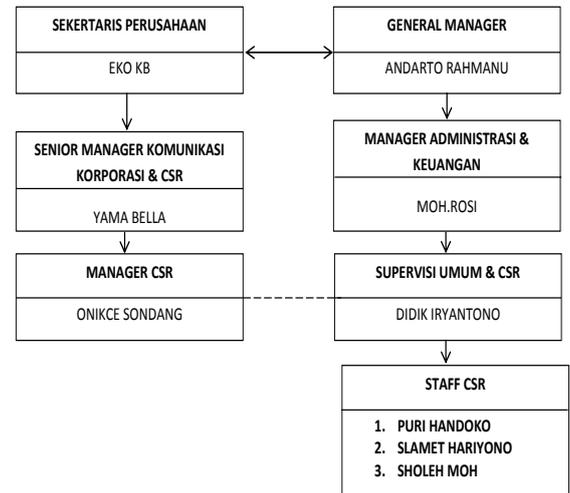
3) Tujuan Perusahaan

- a) Usaha penyediaan tenaga listrik berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang ekonomis, bermututinggi dengan keandalan yang baik.
- b) Usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan serta pemeliharaan.
- c) Usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha perusahaan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki perusahaan.

b. Struktur Organisasi Program Corporate Social Responsibility PT.PJB

Gambar 4.1

Struktur Pengelolaan CSR Kantor Pusat Struktur Pengelolaan CSR Unit Pembangkitan



Struktur Organisasi Corporate Social Responsibility

c. Program Corporate Social Responsibility

1) Deskripsi Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT.PJB Dalam Program Ecomobile Di Jalan Raya Darmo Surabaya.

a) Visi dan Misi Corporate Social Responsibility

Mengacu pada Rencana Strategis *Community Involvement & Development (CID)* Tahun 2014-2018 yang disahkan pada 15 Januari 2014 oleh Direktur Utama yang merupakan komitmen PJB memenuhi ketentuan standar pengelolaan CSR berdasarkan ISO 26000, PJB telah menetapkan Visi dan Misi CSR terkait dengan CID sebagai berikut:

Gambar 4.2

Visi dan Misi Corporate Social Responsibility

Visi CSR PJB <i>Vision of CSR PJB</i>	"Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Kelas Dunia yang Memberi Nilai Tambah Berkelanjutan Bagi Para Pemangku Kepentingan dan Lingkungan Sekitar". "To be A World Class Power Plants Company Supporting Sustainable Additional Value To Stakeholders and surrounding community ".
Misi CSR PJB <i>Mission of CSR PJB</i>	1. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap unsur perusahaan 2. Menjaga keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan energi dan pengelolaan dampak lingkungan yang tepat 3. Mendukung peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan. 1. Applying the principles of good governance in every element of the company 2. Maintaining environmental sustainability through the use of energy and the proper management of environmental impacts 3. Supporting the improvement of the welfare of stakeholders.

b) Tujuan Corporate Social Responsibility

Pedoman pelaksanaan CSR PJB menetapkan bahwa tujuan CSR adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

Gambar 4.3

Tujuan Corporate Social Responsibility

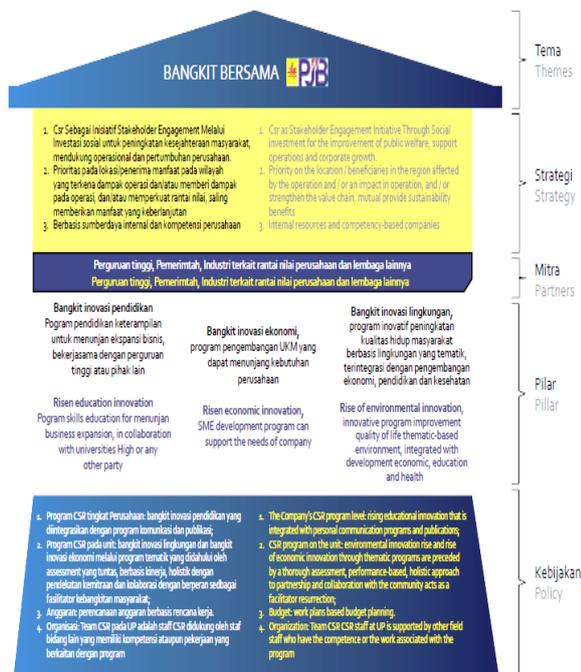


Sejalan dengan Visi Misi PT PJB yaitu Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Kelas Dunia yang memberi nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar dan Tujuan CSR no tiga yaitu menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, jadi *Ecomobile* sendiri memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaan edukasi lingkungan hidup yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat dan sekolah dalam jangkauan yang lebih luas melalui cara-cara yang inovatif, menyenangkan dan berbeda dari pelaksanaan di sekolah.
2. Memberikan contoh kepada masyarakat dan sekolah-sekolah tentang penggunaan energi listrik dari sumber terbarukan yang tak terbatas, yaitu tenaga surya/matahari.
3. Membantu peningkatan minat baca masyarakat melalui koleksi buku-buku lingkungan kekinian.
4. Mengajak masyarakat dan sekolah-sekolah melakukan upaya-upaya nyata berkelanjutan yang dapat mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas.

c) Strategi Corporate Social Responsibility

Dalam mencapai tahapan dalam *Roadmap CSR* di atas, PJB juga telah menyusun dan menerapkan strategi CSR dalam penyusunan program yang lebih terarah sebagaimana skema berikut:



Gambar 4.4

Strategi Corporate Social Responsibility

Sumber: Buku Annual Riport PT.PJB 2014

d) Wilayah Cakupan Corporate Social Responsibility PT.PJB

- a) Wilayah yang terkena dan memberikan dampak terkait operasional perusahaan secara langsung ;
 - 1.1 Ring I : wilayah desa atau kelurahan di mana asset PJB berlokasi.
 - 1.2 Ring II : wilayah kecamatan di mana asset PJB berlokasi.
 - 1.3 Ring III : wilayah kabupaten atau kota di mana asset PJB berlokasi.
 - 1.4 Ring IV : wilayah provinsi di mana asset PJB berlokasi.
- b) Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, sosial, dan masyarakat untuk dikembangkan atau memberi dampak terhadap pembentukan citra positif perusahaan.
- c) Wilayah yang akan dijadikan sebagai unit perusahaan.
- d) Wilayah terkena bencana alam.

e) Alur Pengajuan Dana Corporate Social Responsibility PT.PJB

- 1. Inisiatif perusahaan berdasarkan hasil pemetaan social masyarakat, dalam hal ini perusahaan memiliki inisiatif sendiri dalam menentukan program-program CSR apa saja yang penting untuk dilakukan dalam waktu dengan melihat kondisi

lingkungan social masyarakat baik diwilayah sekitar PT.PJB maupun wilayah sekitar pabrik PT.PJB.

- 2. Permintaan masyarakat/komunitas, dalam hal ini masyarakat/komunitaslah yang memiliki inisiatif sendiri untuk melaksanakan kegiatan social maupun kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti contohnya program Ecomobile yang mengajukan program ini adalah Tunas Hijau Club yang bertujuan memberikan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- 3. Kesesuaian program pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan PT.PJB bekerjasama untuk membicarakan kepentingan masyarakat seperti 4prinsip CSR PT.PJB yaitu Bidang Lingkungan dan Kantibmas, Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Sosial, dan Keagamaan, serta Bidang Kesehatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program Pemerintah dan Program PT.PJB untuk itu dibicarakan bersama agar implementasi program CSR berjalan secara maksimal.
- 4. Kondisi tanggal darurat/bencana alam, program CSR ini khusus mendanai kegiatan-kegiatan yang darurat seperti bencana alam dan keadaan darurat-darurat.

f) Sasaran Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility PT.PJB

Gambar 4.6

Sasaran Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility PT.PJB



Sumber: Annual Riport CSR PT.PJB 2014

B. PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan suatu upaya untuk memecahkan suatu masalah publik. Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. dianalisis dan di diskripsikan berdasarkan Empat variabel dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. (dalam Leo Agustino, 2008 : 149-154) berikut penjelasan analisisnya:

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).

Penyaluran komunikasi dalam program Ecomobile PJB melalui proses pendekatan langsung kepada peserta program Ecomobile hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman informasi yang disampaikan oleh Tunas Hijau Club selaku pelaksana program terhadap masyarakat/peserta program Ecomobile PJB. Dalam kegiatan ini Tunas Hijau Club bukan hanya menyampaikan informasi melalui kata-kata akan tetapi juga mencontohkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Tunas Hijau Club mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup melalui aksi nyata yang dilakukan seperti membuang sampah pada tempatnya, daur ulang sampah menjadi pupuk atau kerajinan tangan yang nantinya mendapat nilai jual yang tinggi dan lain sebagainya. Hal tersebut membuktikan bahwa penyaluran komunikasi disampaikan dengan baik kepada peserta Ecomobile PJB.

b. Kejelasan

Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu

menghalangi implelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari pelaksanaan program Ecomobile bahwasannya dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak pelaksana yaitu PT.PJB dan Tunas Hijau yang sama-sama sebagai pelaksana program Ecomobile bahwasanya kurang adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Hal tersebut disebabkan kurangnya komunakasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Ecomobile yaitu PT.PJB dan Tunas Hijau, bahwasanya ketika ada iven-iven besar Tunas Hijau tidak menginformasikan kepada PT.PJB sehingga PT.PJB terlihat hanya mendanai program sedangkan PT.PJB perlu untuk melihat dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan kegiatan Ecomobile tidak berjalan dengan baik Karena Tunas Hijau memiliki prinsip untuk peduli terhadap lingkungan hidup jadi kegiatan berjalan sesuai yang diinginkan hanya saya tidak ada pengawasan secara langsung dan berkala dari PT.PJB.

c. Konsistensi

Konsisten adalah perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dilihat dari implementasi program Ecomobile PJB bahwasannya bahwa dalam konsistensi komunikasi antara pihak-pihak pelaksana yaitu PT.PJB dan Tunas Hijau belum terjalin secara baik karena masih ada *miscommunication*. Hal tersebut terjadi karena semua pihak merasa telah melakukan kewajibannya masing masing padahal factor komunikasi juga penting agar proses atau kegiatan program ecomobile berjalan dengan baik

2. Sumber daya

a. Sumber daya staf

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Dijelaskan pula dalam buku Agustino (2008:142), sumber daya manusia juga berkaitan dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut selaku pelaksana kebijakan, karena bagaimana sumberdaya manusia yang teredia mampu untuk menjalankan program secara maksimal tentu pertimbangannya adalah kapasitas dan integritas.

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut masyarakat yang melihat program ecomobile di Jalan Raya DARmo Surabaya merasa kurangnya jumlah pendamping untuk lebih mengefektifkan kegiatan ini karena lebih banyak pendamping pasti lebih baik lagi mengingat jumlah minimal peserta ecomobile adalah 40 orang minimal 4 orang pendamping dalam setiap kegiatan.

2) Integritas Sumber Daya Manusia

Integritas merupakan komitmen individu (pelaksana program) menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh pada kode etik dan prinsip-prinsip moral. Jadi menurut hasil observasi peneliti bahwasanya para aktivis Tunas Hijau Club dan PT.PJB sangat memegang teguh pada tujuan yang hendak dicapai bersama yaitu menjaga kelestarian dan keselarasan lingkungan hidup.

b. Sumber daya info

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Program CSR Bidang Lingkungan PT.PJB Dalam Program Ecomobile Di Jalan Raya Darmo Surabaya bahwasanya para pelaksana program telah berhasil menjadi Informan yang baik, terbukti informasi yang telah diberikan dapat dilaksanakan oleh peserta dengan baik.

c. Sumber Daya Wewenang

Dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB di Jalan Raya Darmo Surabaya PT.PJB selaku pembuat program memberikan wewenang penuh kepada Tunas Hijau Clup beserta Aktivistik-aktivisnya untuk melaksanakan program ecomobile. Tunas Hijau dirasa sangat tepat untuk menjadi pelaksana teknis program ecomobile ini mengingat sudah banyak pengalaman Tunas Hijau Club dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

d. Sumber daya fasilitas

1) *Bugdet* (Anggaran) Pengadaan Mobile Edukasi Lingkungan (*Ecomobile*)

Anggaran biaya untuk pengadaan dan pengoperasian Eco Mobile PJB berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibilities) Pembangkitan Jawa-Bali khususnya diambil dari anggaran dana Program CSR Bidang Lingkungan. Dilihat dari presentase anggaran CSR PT.PJB bawasanya untuk CSR bidang lingkungan sebanyak 35% jadi dibandingkan dengan bidang-bidang lain, PT.PJB lebih memprioritaskan pada peningkatan kelestarian dan keselarasan lingkungan hidup khususnya di area kantor dan pabrik PT.PJB.

2) *Bugdet* (Anggaran) Pembiaayaan Kegiatan program Mobile Edukasi Lingkungan keliling (*Ecomobile*)

Dalam Surat Perjanjian PT.PJB dan Tunas Hijau Club tercantum dalam Pasal 5 tentang Dana Operasional pelaksanaan Program Ecomobile PJB bahwa sumber daya fasilitas program Ecomobile PJB telah terpenuhi dengan baik karena di PT.PJB kegiatan CSR rutin akan di danai sesuai dengan perjanjian kerjasama bersama pihak pelaksana program CSR. Untuk itu dalam hal Sumber Daya Fasilitas tidak ada kendala karena setiap bulannya sudah di anggarkan dan disiapkan dana untuk pelaksanaan program Ecomobile PJB.

3. Disposisi

a. Rekrutmen Pengurus / Pengangkatan birokrat

Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya. merupakan program yang positif untuk lingkungan, untuk itu PT.PJB memilih Tunas Hijau sebagai patner untuk melaksanakan CSR Bidang lingkungan dalam program Ecomobile karena melihat pengalaman Tunas Hijau dalam melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu tidak ada rekrutment khusus dalam mencari anggota pelaksana program Ecomobile PJB karena yang membantu kegiatan ecomobile adalah anggota dari Tunas Hijau Club serta aktivis yang berasal dari kalangan Mahasiswa.

Tunas Hijau dan PT.PJB sangat merespon positif terhadap terlaksananya program ini, bukan hanya para implementor tetapi masyarakat sangat senang adanya program

ini karena sambil bermain anak-anak juga dapat belajar tentang lingkungan hidup. dapat diketahui bahwa Tunas Hijau Club sudah mengetahui tugasnya masing-masing, dan para implementor merespon positif kegiatan Ecomobile PJB.

b. Insentif

Pendapat George C. Edward III, insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan program Ecomobile tidak terdapat biaya insentif untuk Tunas Hijau maupun aktivis-aktivisnya, karena dana insentif memang tidak dianggarkan dalam kegiatan atau program Ecomobile PJB.

4. **Struktur Birokrasi**

a. *Standar Operating Procedure (SOP)*

Standar Operating Procedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan / administrator / birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

Bagian yang terpenting dalam organisasi kebijakan adalah adanya SOP. Kegunaan SOP merupakan suatu pedoman tertulis yang dipergunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi yang dijalankan efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasikan.

Dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB di Jalan Raya Darmo Surabaya standar yang paling utama yang harus dilaksanakan yaitu adanya 40 peserta yang mengikuti kegiatan dilihat dari indikator ini, Tunas Hijau Club sudah sangat berhasil untuk menarik masyarakat ikut serta dalam kegiatan ini mengingat pada hari minggu di Jalan Raya Darmo Surabaya sangat ramai di datangi pengunjung.

1) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin yaitu Direktur PT.PJB serta Direktur Tunas Hijau Club menjadi pejabat tertinggi dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB ini, dimana setiap bagian organisasi memiliki keterkaitan dan memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB tidak ada Struktur Organisasi yang baku secara tertulis, akan tetapi pembagian tugas masing-masing bagian sudah tertulis jelas dalam perjanjian program Ecomobile sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan program Ecomobile PJB.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan dan dijelaskan dalam hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya, yang dianalisis melalui teori yang diungkapkan oleh George C. Edward III mengenai variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat disimpulkan dengan melihat Empat variabel tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, dilihat dari segi komunikasi terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu terdapat 3 indikator. Indikator pertama yaitu Transmisi, Dilihat dari pelaksanaan program Ecomobile PJB di Jalan Raya Darmo Surabaya bahwasanya komunikasi dalam variable transmisi ini Tunas Hijau Club selaku pelaksana teknis program ecomobile sangat inofatif dalam menginformasikan program yang akan dijalankan kepada peserta, cara penyampaian program yaitu dengan pendekatan secara langsung kepada peserta program Ecomobile PJB. Indikator Kedua yaitu Kejelasan, PT.PJB dan Tunas Hijau adalah pelaksana program Ecomobile dilihat dari pelaksanaan program Ecomobile PJB di Jalan Raya Darmo Surabaya bahwasanya komunikasi

terjalin kurang baik antara pihak-pihak pelaksana program yaitu antara Tunas Hijau dan PT.PJB dapat dikatakan komunikasi yang terjalin kurang jelas.

Indikator ketiga yaitu Konsistensi, Dilihat dari pelaksanaan ecomobile dalam segi konsistensi komunikasi bahwasanya belum terjalin secara baik karena masih ada *miscommunication*. Hal tersebut terjadi karena semua pihak merasa telah melakukan kewajibannya masing masing padahal factor komunikasi juga penting agar proses atau kegiatan program ecomobile berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian ini, dilihat dari segi komunikasi terdapat 4 indikator sumber daya yaitu *Indikator Pertama* Sumber Daya Staff, dilihat dari kapasitas sumber daya manusia mengingat jumlah peserta minimal 40 orang disetiap kegiatan seharusnya minimal perbandingannya adalah 40 berbanding 10 jadi minimal terdapat 4 orang yang mendampingi peserta program ecomobile. Selain kapasitas sumber daya manusia terdapat integritas sumber daya manusia yang kaitannya dengan komitmen pelaksana program dalam melaksanakan program ecomobile ini, dalam hal ini Tunas Hijau Club sangat merespon positif kegiatan ini. *Indikator Kedua* Sumber Daya Info, dilihat dari sumber daya info para pelaksana program telah berhasil menjadi Informan yang baik, terbukti informasi yang telah diberikan dapat dilaksanakan oleh peserta dengan baik.

Indikator Ketiga yaitu Sumber Daya Wewenang, dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB di Jalan Raya Darmo Surabaya PT.PJB selaku pembuat program memberikan wewenang penuh kepada Tunas Hijau Club beserta Aktivistik-aktivisnnya untuk melaksanakan program ecomobile. Tunas Hijau dirasa sangat tepat untuk menjadi pelaksana teknis program ecomobile ini mengingat sudah banyak pengalaman Tunas Hijau Club dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. *Indikator Keempat* yaitu Sumber Daya Fasilitas, dilihat dari variable *Budget* (Anggaran) Pengadaan Mobile Edukasi Lingkungan (*Ecomobile*) bahwasanya Anggaran biaya untuk pengadaan dan pengoperasian Eco

Mobile PJB berasal dari dana CSR (Corporate Social/ Responsibilities) Pembangunan Jawa-Bali khususnya diambil dari anggaran dana Program CSR Bidang Lingkungan. Variable kedua yaitu *Budget* (Anggaran) Pembiayaan Kegiatan program Mobile Edukasi Lingkungan keliling (*Ecomobile*) bahwasanya sumber daya fasilitas program Ecomobile PJB telah terpenuhi dengan baik karena di PT.PJB kegiatan CSR rutin akan di danai sesuai dengan perjanjian kerjasama bersama pihak pelaksana program CSR.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian ini, dilihat dari variable disposisi terdapat dua indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable disposisi. *Indikator Pertama* yaitu Rekrutmen Pengurus / Pengangkatan birokrat, tidak ada rekrutment khusus dalam mencari anggota pelaksana program Ecomobile PJB karena yang membantu kegiatan ecomobile adalah anggota dari Tunas Hijau Club serta aktivis yang berasal dari kalangan Mahasiswa. *Indikator Kedua* yaitu Insentif, dalam pelaksanaan program Ecomobile tidak terdapat biaya insentif untuk Tunas Hijau maupun aktivis-aktivisnnya, karena dana insentif memang tidak dianggarkan dalam kegiatan atau program Ecomobile PJB.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, dilihat dari variable Struktur Birokrasi terdapat dua indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable Struktur Organisasi yaitu *Indikator Pertama* yaitu *Standar Operating Procedures* (SOPs), Dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB di Jalan Raya Darmo Surabaya standar yang paling utama yang harus dilaksanakan yaitu adanya 40 peserta yang mengikuti kegiatan dilihat dari indikator ini, Tunas Hijau Club sudah sangat berhasil untuk menarik masyarakat ikut serta dalam kegiatan ini mengingat pada hari minggu di Jalan Raya Darmo Surabaya sangat ramai di datangi pengunjung. *Indikator Pertama* yaitu Fragmentasi, Dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB tidak ada Struktur Organisasi yang baku secara tertulis, akan tetapi pembagian tugas masing-masing bagian sudah tertulis jelas dalam perjanjian program Ecomobile sehingga

program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan program Ecomobile PJB.

B. Saran

Dari hasil pemaparan mengenai Implementasi Program Ecomobile PT.Pembangkitan Jawa-Bali Di Jalan Raya Darmo Surabaya., maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Untuk PT.Pembangkitan Jawa-Bali seharusnya walaupun tidak ikut serta setiap hari dalam pelaksanaan program Ecomobile PJB tetapi harus ada agenda minimal 1 Bulan sekali untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Ecomobile khususnya pada acara yang menghadirkan banyak sekolah dan kelompok masyarakat di ruang terbuka. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat mengevaluasi lebih jelas progres pelaksanaan program Ecomobile PJB.
2. Kapasitas SDM dalam melaksanakan program Ecomobile PJB yaitu aktivis-aktivis Tunas Hijau Club sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan ini namun perlu adanya penambahan aktivis agar pelaksanaan kegiatan lebih mudah dan memaksimalkan kegiatan ecomobile PJB.
3. Menjalinkan komunikasi dan koordinasi dengan baik supaya tidak terjadi *miscommunication* antara pihak-pihak pelaksana Program Ecomobile PJB.
4. Sebaiknya semua kegiatan Ecomobile khususnya kegiatan besar, diinformasikan kepada pihak PT.PJB khususnya staff CSR hal tersebut dilakukan agar PT.PJB juga dapat ikut terjun langsung dalam kegiatan Ecomobile dan nantinya dapat mengevaluasi apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan CSR PT.PJB.
5. Setiap program harus memiliki SOPs dan Struktur organisasi agar fungsi dan tugas para pelaksana program ecomobile PJB teruraikan secara jelas .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV.Alfabeta
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Budimanta,A,Prasetijo,A.,Rudito,B.2004.*Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta : ICSD
- Moleong, J. Lexy. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- _____. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Riant Nugroho, Dwidjowijoto. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Soebarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility: From Charity To Sustainability*. Jakarta:Salemba Empat.
- Suandi.2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka,Cipta.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Bisnis,Edisi Enam*. Bandung:CV.Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____.2013.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA
- Suharno. 2009. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Madia Pressindo.
- _____. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota KAPI).
- _____. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT.Buku Kita.

Dokumen:

ANNUAL REPORT PT.Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2013

ANNUAL REPORT PT.Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2014

Proposal Pelaksanaan Program Ecomobile PT.PJB dengan Tunas Hijau Club

Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Ecomobile PT.PJB dengan Tunas Hijau Club.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 2007 Pasal 74 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Keputusan Direksi PT.Pembangkitan Jawa Bali No:073.K/010/DIR/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Jurnal:

Putranti Budi Maygarindra, Rovila El Maghviroh. 2012. Analisis Alokasi Dana *Corporate Social Responsibility* Serta Pelaporan *Sustainability Report* Berdasarkan *Global Reporting Initiative* (Gri G3) Di PT. Pembangkitan Jawa Bali. Surabaya:Stie Perbanas Surabaya

Rickhy George. 2013. Implementasi Corporate Social Responsibility Di PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkit Gresik. Surabaya: Universitas Airlangga

Berita Online:

<http://eco-mobile.tunashijau.org/>

www.ptpjb.com